

**Pemberdayaan Perempuan Berpendapatan Rendah melalui Strategi  
Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)  
Cabang Cileungsi, Bogor, Jawa Barat**

***Empowering Low Income Women through Inclusive Financial Strategies by  
Mitra Dhuafa Cooperative (KOMIDA) of Cileungsi Branch, Bogor, West Java***

**Junius Fernando S Saragih<sup>1</sup> dan Isbandi Rukminto Adi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> <sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia

Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Email: juniusfernandosaragih@gmail.com ; adi1126@yahoo.com

HP : 081263581355

Naskah diterima 21 Maret 2020, direvisi 14 April 2020, disetujui 30 April 2020

***Abstract***

*This article discusses the empowerment of low-income women by Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) of the Cileungsi Branch through inclusive financial policies. The problem of poverty levels in Bogor, West Java, which is still relatively high, can be overcome by increasing the contribution of women in entrepreneurship. Women are said to have domestic obligations to take care of the household which has an impact on the level of female labor force participation which is lower than men. Therefore facilitating financial access for low-income women is one of some solutions besides there is a need to implement non-financial empowerment for them. This study aimed to describe and to analyze the empowerment carried out by KOMIDA through inclusive finance, as well as to explain and to analyze how the utilization of KOMIDA's financing by its members and its impact on family welfare. This research used a qualitative approach with a descriptive type. The results showed that low-income women were able to utilize the financing conducted by KOMIDA to start and to develop their entrepreneurial businesses so that they could increase financial income and family welfare. Empowerment had successfully trained its members in financial management and thus, in preparing for the future by saving. However, non-financial empowerment had not been effective because of the large workload given to field officers handling the empowerment. It is therefore necessary to pay attention to reducing the workload of field workers and to make non-financial services be a special activity outside the responsibilities of field officers.*

***Keywords: empowerment; financial inclusion; financial access; welfare***

***Abstrak***

Artikel ini membahas mengenai pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Cileungsi melalui kebijakan keuangan inklusif. Masalah tingkat kemiskinan di Bogor Jawa Barat yang masih tergolong tinggi dapat diatasi dengan meningkatkan kontribusi perempuan dalam dunia usaha. Perempuan dikatakan memiliki kewajiban domestik mengurus rumah tangga berdampak pada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Oleh karena itu mempermudah akses keuangan terhadap perempuan berpendapatan rendah adalah salah satu solusi disamping perlunya menerapkan pemberdayaan non keuangan bagi mereka. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis pemberdayaan yang dilakukan KOMIDA melalui keuangan inklusif, serta menjelaskan dan menganalisis bagaimana pemanfaatan pembiayaan oleh anggotanya serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perempuan berpendapatan rendah mampu memanfaatkan pembiayaan untuk memulai dan mengembangkan usahanya sehingga berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan berhasil melatih anggota dalam pengelolaan

keuangan dan mempersiapkan masa depan dengan menabung. Namun pemberdayaan nonkeuangan belum efektif karena besarnya beban kerja yang diberikan kepada petugas lapangan. Oleh karena itu perlu memperhatikan pengurangan beban kerja petugas lapangan dan menjadikan pelayanan nonkeuangan sebagai kegiatan khusus di luar tanggung jawab petugas lapangan.

**Kata Kunci :** pemberdayaan; keuangan inklusif; akses keuangan; kesejahteraan

### A. Pendahuluan

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan salah satu tujuan nasional Indonesia adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya kesenjangan sosial dan kemiskinan masih belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan data BPS pada September 2018, persentase kemiskinan di Indonesia sebanyak 9,66 persen. Persentase ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah dan baru kali ini mencapai level satu digit. Dalam sepuluh tahun ke belakang kemiskinan berhasil diturunkan sebanyak 5,76 persen.



Grafik 1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia (Periode 2007-2018)  
Sumber: BPS, 2018.

Upaya pengentasan kemiskinan selama satu dekade belakangan dilakukan oleh dua kepemimpinan yang berbeda yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan Joko Widodo. Data di atas memperlihatkan tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan 2018. Penurunan kemiskinan pada masa pemerintahan Joko Widodo belum tergolong signifikan bila dibandingkan masa pemerintahan SBY. Hal ini terlihat jelas pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Pemerintahan SBY berhasil menurunkan

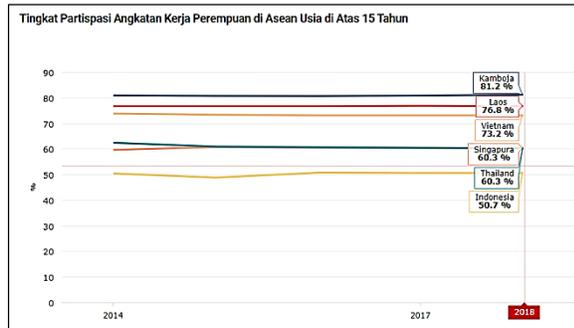
tingkat kemiskinan sebesar 3,19 persen. Sementara itu, pada pemerintahan Joko Widodo yakni dari tahun 2014 hingga 2018 tingkat kemiskinan Indonesia hanya turun sebanyak 1,14 persen. Artinya sedang terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan. Apabila tren penurunan kemiskinan di masa pemerintahan SBY (2009-2014) bisa dipertahankan idealnya pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mencapai 7,77 persen.

Program pengentasan kemiskinan oleh dua kepala pemerintahan ini juga tidak banyak perbedaan hanya ada perubahan terminologi serta penambahan sedikit program baru misalnya pada bidang manajemen keuangan. Pemerintah memberlakukan kebijakan keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang merupakan seluruh daya upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga ataupun nonharga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014).

Strategi nasional keuangan inklusif ini diyakini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu. Semakin banyak orang miskin yang terhubung dengan layanan jasa keuangan, semakin banyak juga yang berpeluang mengembangkan perekonomiannya dan lebih baik pengelolaan keuangannya.

Di sisi lain, partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan masih menjadi masalah. Data BPS memperlihatkan kesenjangan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu 2011-2019. Pada 2010, TPAK laki-laki adalah 83,76 persen dan turun sedikit pada tahun 2017 menjadi 82,51 persen. Sementara itu, TPAK

perempuan tahun 2010 sebesar 51,76 persen dan turun menjadi 50,89 persen pada 2017. Tampak bahwa belum ada peningkatan TPAK perempuan dan masih jauh dari TPAK laki-laki.



Grafik 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Asean Usia di Atas 15 Tahun dari Tahun 2014-2018. Sumber: Databoks.co.id, 2019.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2014 Indonesia memiliki TPAK perempuan terendah di Asean. Meskipun pada tahun 2018 berada pada posisi 50.7 persen, namun tetap terendah dibandingkan Thailand, Singapura, Vietnam, Laos dan Kamboja. Padahal dari 265 Juta jiwa jumlah penduduk Indonesia, 131.88 juta adalah perempuan, data ini disampaikan oleh BPS dan United Nations Population Fund, 2018. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi perempuan berpendapatan rendah masih penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia di tengah-tengah masalah keterbatasan lapangan pekerjaan dan pelayanan keuangan mikro yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok paling miskin.

Berdasarkan Basis Data Terpadu, 40 persen masyarakat berpendapatan rendah memiliki akses terbatas atau tidak memiliki akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40 persen berpendapatan rendah, hanya terdapat 22,2 persen penduduk dewasa berpendapatan rendah yang memiliki rekening, sedangkan sisanya masih belum tersentuh oleh layanan keuangan. Fakta

menarik, penduduk miskin Indonesia tertinggi ternyata berada di Pulau Jawa. Sejumlah 7.17 juta masyarakat miskin tersebar di pedesaan Pulau Jawa dan 6.77 juta lainnya di perkotaan. Perbandingan data jumlah kemiskinan berdasarkan pulau di Indonesia dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2017 (dalam satuan juta jiwa)

| Daerah                    | Jumlah Penduduk Miskin |           | Jumlah Penduduk Miskin Secara Nasional |           |
|---------------------------|------------------------|-----------|--|-----------|
|                           | Perkotaan              | Perdesaan | Perkotaan                              | Perdesaan |
| <b>Jawa</b>               | 6,77                   | 7,17      |  |           |
| <b>Sumatera</b>           | 2,05                   | 3,92      |  |           |
| <b>Kalimantan</b>         | 0,32                   | 0,66      | 10,27                                  | 16,31     |
| <b>Sulawesi</b>           | 0,43                   | 1,68      |  |           |
| <b>Bali-Nusa Tenggara</b> | 0,58                   | 1,48      |  |           |
| <b>Maluku-Papua</b>       | 0,12                   | 1,40      |  |           |

Sumber: BPS (2018)

Dari 40 persen jumlah masyarakat miskin yang jauh dari akses keuangan, di antaranya terdapat perempuan yang berpendapatan rendah atau bahkan tidak berpendapatan. Dari total penduduk dewasa wanita di Indonesia, hanya terdapat 37,5 persen wanita yang memiliki rekening (Habibullah, 2019: p.39). Hal ini menjadi isu menarik ketika seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) sebenarnya berpeluang membantu meningkatkan perekonomian keluarga sementara tidak memiliki akses yang baik terhadap jasa layanan keuangan. Sebagaimana kita ketahui, upaya yang

dilakukan pemerintah untuk menyentuh perempuan berpendapatan rendah adalah dengan melakukan program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun, tidak semua dari perempuan berpendapatan rendah dapat mengakses modal terlebih lagi melakukan manajemen keuangan dengan baik. Oleh karena itu, sistem keuangan inklusif menjadi solusi karena selain memberikan akses modal, juga memberikan pengetahuan manajemen keuangan dalam menjalankan usaha.

Persoalannya, tidak semua lembaga keuangan Indonesia menyentuh langsung kepada masyarakat bawah, padahal fungsi utama kebijakan keuangan inklusif adalah memberikan akses kepada masyarakat miskin. Salah satu lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat adalah Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). KOMIDA berdiri sejak tahun 2004 dengan tujuan membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Selain pembiayaan juga terdapat fasilitas simpanan dan pemberdayaan nonkeuangan.

Menyadari adanya kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan serta Bullock (2013) dalam pengantar bukunya mengungkapkan bahwa 70 persen orang miskin di dunia adalah perempuan, sudah tepat jika KOMIDA berfokus pada pemberdayaan perempuan. Keunggulan pembiayaan KOMIDA adalah tanpa agunan serta pengajuan yang mudah dengan menggunakan satu formulir. KOMIDA juga menjalankan fungsi KUR (Annual Report KOMIDA, 2017). KOMIDA termasuk salah satu lembaga *microfinance* yang bertahan eksis dan memiliki 312 Kantor Cabang seluruh Indonesia dan 10 Kantor Regional.

Potensi perempuan untuk meningkatkan pendapatan perlu didorong dengan memudahkan akses terhadap modal. Lapangan pekerjaan bertambah seiring meningkatnya minat usaha karena mendapat modal. Rahmah, dkk (2013: p.75)

mengatakan seorang istri yang bekerja berkontribusi pada pendapatan rumah tangga keluarga dan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk keperluan sekolah maupun perawatan keluarga. Itu artinya menolong perempuan berpendapatan rendah sama halnya mengentaskan kemiskinan keluarganya.

Kemiskinan dapat diselesaikan dengan pendekatan keuangan inklusif yang dilakukan oleh KOMIDA. Pendekatan tersebut memberdayakan perempuan berpendapatan rendah secara ekonomi yang pada ujungnya berguna untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia secara umum dan khususnya di lingkungan Cabang Cileungsi, Bogor.

Di Cabang Cileungsi terdapat 2.845 anggota KOMIDA menjadi penerima manfaat pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis koperasi. Selain itu, Cileungsi merupakan daerah industri Jabodetabek dan terdapat Taman Wisata Nasional Mekarsari yang merupakan tempat pelestarian buah-buah Tropika terbesar di dunia. Meskipun sebagai daerah industri yang sudah terkenal dan juga pusat pelestarian buah tropika terbesar di dunia, kesejahteraan masyarakat di Cileungsi khususnya perempuan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah (Website Resmi Pemerintah Kecamatan Cileungsi, 2015). Menariknya Cileungsi merupakan kawasan industri yang tentunya bercorak perkotaan sementara sistem yang digunakan oleh KOMIDA adalah *grameen bank* yang pada prinsipnya menasar daerah-daerah pedesaan.

Berdasarkan masalah dan kesenjangan penelitian di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah melalui strategi keuangan inklusif oleh KOMIDA di Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan 2) Bagaimana pemanfaatan pembiayaan oleh anggota KOMIDA? Berdasarkan pertanyaan

penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) menguraikan dan menganalisis pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah melalui strategi keuangan inklusif oleh KOMIDA di Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan 2) menjelaskan dan menganalisis pemanfaatan pembiayaan oleh anggota KOMIDA.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagaimana dikatakan Moleong (2005, p.5) untuk memahami fenomena secara alamiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sementara teknik analisis yang digunakan sebagaimana dikatakan Neuman (2016, p.560-570) yaitu analisis penelitian kualitatif bersifat induktif. Tahapannya yaitu pengumpulan, perekaman, penyeleksian dan pemerosesan data terdiri dari sortir, klasifikasi, pengkodean (*open, axial dan selective coding*) dilanjutkan dengan interpretasi dan elaborasi.

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan lokasi salah satu Cabang Koperasi Mitra Dhuafa yang menerapkan kebijakan keuangan inklusif kepada perempuan berpendapatan rendah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2019. Teknik pemilihan informan adalah dengan teknik *purposive sampling*, sejumlah 24 (dua puluh empat) orang yang dijadikan informan adalah mereka yang mengetahui dengan pasti pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah yang dilakukan KOMIDA melalui kebijakan keuangan inklusif. Informan yang dipilih adalah: (1) Pengurus KOMIDA Pusat, (1) Manajer KOMIDA Cileungsi, (1) Asisten Manajer KOMIDA Cileungsi, (4) Staf Lapangan KOMIDA Cileungsi, (2) Staf Community

Development KOMIDA Pusat, (5) Ketua *center*/kelompok anggota KOMIDA (10) anggota KOMIDA. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

## **C. Pemberdayaan KOMIDA melalui Strategi Keuangan Inklusif**

Sasaran pemberdayaan melalui strategi keuangan inklusif oleh KOMIDA adalah perempuan berpendapatan rendah yang disahkan menjadi anggota. Pendapatan yang dimaksud ditinjau dari pendapatan per kapita keluarga yang dinyatakan layak memperoleh pembiayaan apabila pendapatan per kapitanya di bawah 1 juta rupiah per bulan. Perempuan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi berpeluang memperoleh pembiayaan selama tidak ada calon anggota lain yang berpendapatan lebih kecil dari pendapatannya.

Pengajuan pembiayaan disetujui tergantung seberapa besar ketersediaan pembiayaan itu sendiri. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pembiayaan yang tersedia di KOMIDA lebih besar dari permintaan pembiayaan sehingga perempuan berpendapatan rendah yang memiliki keseriusan untuk berwirausaha berpeluang besar memperoleh pembiayaan. Hal ini dibuktikan dari upaya penambahan jumlah anggota yang masih terus dilakukan dan ditingkatkan. Nominal pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena perempuan berpendapatan rendah pada umumnya berkecimpung dalam usaha yang berskala kecil dan menengah. Nominal yang dapat diperoleh pada pengajuan tahap pertama antara 2 sampai dengan 3 juta rupiah dan mengalami peningkatan pada pengajuan tahap berikutnya.

Pemberdayaan melalui strategi keuangan inklusif dilakukan KOMIDA dengan memudahkan akses pembiayaan

tanpa agunan. Anggota tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan menghabiskan waktu untuk datang ke kantor karena petugas lapangan akan mendatangi pertemuan *center* yang diselenggarakan setiap minggu. Semua transaksi keuangan hanya dilakukan pada pertemuan *center*. Di sisi lain, transaksi keuangan tidak harus dalam jumlah yang besar di mana nominal transaksi minimal adalah 500 rupiah yang tentu saja mengakomodasi kondisi perempuan berpendapatan rendah. Kemudahan-kemudahan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sarma (2012, p.3) bahwa keuangan inklusif adalah sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan kemanfaatan dari sistem keuangan formal untuk semua anggota entitas ekonomi.

Pembiayaan sangat bermanfaat untuk memulai usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada sehingga berpotensi menambah pendapatan dan menyejahterakan keluarga. Sebagaimana dikatakan Zastrow (2010: p.409) bahwa menolong seseorang meningkatkan kepribadian, sosioekonomi dan kekuatan mereka dalam rangka perbaikan keadaan dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pemberdayaan. Hal ini juga mengurangi masalah keterbatasan akses keuangan yang membuat banyak perempuan berpendapatan rendah enggan untuk berwirausaha atau tidak mampu mengembangkan usaha yang sudah ada.

Anggota KOMIDA merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan modal usaha. Bahkan, termotivasi untuk menambah jenis usaha selain usaha mereka yang sudah ada sebelumnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Informan AK-13 yang mengatakan pembiayaan modal usaha digunakan untuk menambah usaha baru. Anggota tersebut membeli mesin jahit mengingat dirinya memiliki bakat menjahit dan nominal pembiayaan yang diperoleh jauh

lebih besar dari kebutuhan usaha sebelumnya yaitu menjual gorengan. Menurut pengakuannya pembiayaan yang diperoleh sebesar 4 juta rupiah dimanfaatkan untuk membeli mesin jahit seharga Rp. 2.400.000,00 lalu sisanya digunakan membeli bahan kain dan bahan-bahan membuat gorengan.

Suharto (2009: p.1) memaknai kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi yang melakukan aktivitas terorganisir untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. KOMIDA meningkatkan kualitas hidup perempuan berpendapatan rendah dengan memodali usaha mereka. Kegiatan berwirausaha tepat bagi perempuan berpendapatan rendah karena tidak mengganggu kewajiban domestik untuk mengurus rumah tangga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KOMIDA adalah salah satu institusi yang mengusahakan kesejahteraan sosial bagi perempuan berpendapatan rendah yang ada di wilayahnya.



Tabel 2 Deskripsi Gambar 1 – Proses memperkenalkan KOMIDA pada Pertemuan Umum

|                              | <b>Keterangan</b>   |
|------------------------------|---|
| <b>Pemberi materi</b>        | Manajer Cabang  |
| <b>Materi pertemuan umum</b> | -Sejarah dan peran KOMIDA sebagai mitra dhuafa.<br>-Keunggulan dan syarat pemanfaatan |

|               |   |
|---------------|---|
|               | pembiayaan dan simpanan.<br>-Sesi tanya jawab dan diskusi   |
| <b>Waktu</b>  | Rabu, 22 Oktober 2019, Pukul 14.30 WIB                      |
| <b>Lokasi</b> | Rumah salah seorang calon anggota di daerah Cileungsi Kidul |

Sumber : Hasil Observasi, Diolah Peneliti

Sulistiyani (2004. p.82) mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat yang mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, orang yang diberdayakan mampu memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

KOMIDA memberikan daya berupa pembiayaan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Anggota juga diberdayakan untuk merencanakan masa depan. Pasalnya, pembiayaan baru dapat diperoleh setelah anggota membuat pengajuan pembiayaan dengan menulis rincian tujuan penggunaan pembiayaan secara mandiri. Anggota dididik untuk merencanakan tahap demi tahap yang akan dilakukan manakala berhasil memperoleh pembiayaan sehingga ke depannya mampu mengambil keputusan-keputusan secara mandiri.

Setelah menuliskan rincian penggunaan pembiayaan, anggota wajib mengutarakannya di depan semua anggota sehingga semua saling tahu tujuan penggunaan pembiayaan masing-masing. Petugas lapangan akan melakukan monitoring ke lokasi usaha untuk menyesuaikan perencanaan dengan penggunaan rill di lapangan. Kesesuaian rencana dengan penggunaan rill lapangan menjadi catatan prestasi anggota untuk

dipertimbangkan pada saat pengajuan tahap berikutnya.

Anggota memiliki keleluasaan untuk mengelola pembiayaan secara mandiri untuk keperluan usahanya. Apabila anggota tidak menggunakan pembiayaan untuk keperluan usaha melainkan dimanfaatkan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif, maka konsekuensinya anggota tersebut tidak berhasil meningkatkan pendapatan dan gagal menyejahterakan keluarganya. Monitoring bukanlah bentuk intervensi melainkan suatu upaya memastikan penggunaan pembiayaan sesuai dengan rencana anggota itu sendiri sehingga berhasil memperoleh keuntungan di masa depan.

Berdasarkan hasil monitoring alasan anggota tidak mampu mengembalikan pembiayaan yaitu karena menyalahgunakan pembiayaan yang diterima tidak dimanfaatkan untuk keperluan usaha. Ada yang bangkrut karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan dan pembiayaan tidak dimanfaatkan untuk keperluan yang produktif. Hal inilah yang ingin dihindari mengapa monitoring tetap dilakukan baik dengan mengunjungi lokasi usaha anggota maupun pada saat pertemuan *center*.

#### D. Proses Pembiayaan

Pembiayaan hanya diberikan kepada perempuan berpendapatan rendah yang sudah sah menjadi anggota dan memiliki kelompok. Kendati pembiayaan berbasis kelompok, pembiayaan tetap dimanfaatkan secara personal sesuai kebutuhan masing-masing anggota. Fungsi kelompok terlihat manakala di kemudian hari terdapat salah satu anggota tidak mampu membayar angsuran pengembalian pembiayaan. Seluruh anggota kelompok memiliki tanggung jawab kolektif untuk membayar angsuran pembiayaan anggota tersebut. Sistem ini dikenal dengan sebutan tanggung renteng.

Syarat anggota kelompok adalah perempuan, rumah berdekatan, saling kenal

dan percaya, tidak ada hubungan darah, memiliki usaha atau bersedia membentuk usaha dan diketahui oleh suami atau keluarga masing-masing.



Tabel 3 Deskripsi Gambar 2 – Potret ekonomi calon anggota baru

|                          | <b>Keterangan</b>  |
|--------------------------|--|
| <b>Kelayakan rumah</b>   | Rumah kecil, bukan hak milik. Mengontrak selama 5 tahun  |
| <b>Aset rumah tangga</b> | Sepeda motor, televisi dan kipas angin, kulkas.  |
| <b>Kondisi ekonomi</b>   |  |
| Pekerjaan                | Calon anggota jualan sembako keliling, suami buruh pabrik.   |
| Pendapatan per bulan     | Suami:Rp.3.500.000,00<br>Istri: Rp.800.000,-.  |
| Pengeluaran per bulan    | Biaya makan Rp.900.000,- ;<br>Biaya kontrakan Rp. 500.000,00 ;<br>Listrik Rp.150.000,00 ;<br>Minum pakai air galon |
| Jumlah Anak              | 3 orang, baru satu yang sekolah PAUD   |

Sumber : Hasil Observasi, Diolah Peneliti

Setiap calon anggota diuji kelayakannya dengan memotret kondisi ekonomi meliputi rumah, aset rumah tangga dan pendapatan. Rumah dan aset rumah tangga calon anggota harus mencerminkan keluarga berpendapatan rendah bila dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Potret kondisi ekonomi dihasilkan melalui wawancara dan observasi langsung ke rumah calon anggota dan wajib dihadiri oleh suami yang bersangkutan.

Setelah dinyatakan layak melalui potret ekonomi calon anggota wajib mengikuti Latihan Wajib Kelompok (LWK) selama 5 hari dilanjutkan dengan ujian pengesahan kelompok oleh manajer cabang. Jika lulus anggota berhak mengajukan pembiayaan.

Kelompok diwajibkan hadir pada pertemuan *center* yang diselenggarakan setiap minggu di lokasi yang disepakati biasanya tidak jauh dari rumah masing-masing anggota. *Center* merupakan gabungan dari beberapa kelompok yang bersepakat melakukan pertemuan *center* di lokasi yang sama. Kehadiran anggota tidak bisa diwakilkan oleh siapapun dan nantinya menjadi catatan prestasi untuk menentukan apakah anggota tersebut layak memperoleh peningkatan pembiayaan pada periode berikutnya.

Pertemuan *center* berdurasi di bawah 30 menit menjadi sarana mempererat silaturahmi, saling berbagi informasi. Namun terutama sebagai wadah untuk transaksi keuangan meliputi pengajuan dan pencairan pembiayaan, kegiatan setor angsuran, setor simpanan serta penarikan simpanan. Pertemuan ini merupakan wujud pelayanan prima terhadap anggota yaitu bertransaksi keuangan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi atau harus antri berlama-lama di kantor.

Proses akad pembiayaan diawali oleh petugas lapangan dengan mengajak anggota yang mengajukan pinjaman membaca

“basmallah” lalu petugas lapangan mengucapkan “cukupkanlah takaran jangan menjadi orang-orang yang merugi.” Selanjutnya dilakukan perjanjian jual beli dengan menyebutkan harga pokok pembiayaan, jumlah margin ketika pembayaran, jumlah minggu penyetoran angsuran, jumlah setoran per minggu, ungkapan persetujuan dan keikhlasan anggota untuk membeli barang dan bersedia membayar angsuran setiap minggunya.



Tabel 4 Deskripsi Gambar 3 – Proses akad petugas lapangan dan anggota

|                           | <b>Keterangan</b>  |
|---------------------------|--|
| <b>Nominal pembiayaan</b> | Rp.5.500.000,-   |
| <b>Angsuran mingguan</b>  | Rp.137.500,-<br>dengan membayar simpanan wajib<br>Rp.6.000,- |
| <b>Lama pembiayaan</b>    | 50 minggu  |

Sumber: Hasil Observasi, Diolah Peneliti

Petugas lapangan menyerahkan uang kepada anggota, dengan mengucapkan kalimat: “dengan ini saya mewakili kepada ibu agar membeli sendiri barang yang dimaksud, dengan sampainya barang tersebut ke ibu maka kita sepakat akad jual beli telah terjadi, semoga pembiayaan ini bisa membantu perkembangan usaha ibu serta diberikan kelancaran dalam mengembalikannya setiap minggu.”

Berdasarkan pengakuan para anggota yang sudah menjadi anggota di atas 5 tahun nilai pembiayaan awal yang mereka terima adalah 2 juta rupiah. Nilai pembiayaan kedua dan seterusnya meningkat antara 500 ribu sampai dengan satu juta rupiah. Hal tersebut mempertimbangkan catatan prestasi meliputi kedisiplinan anggota menyetor angsuran dan menabung, kehadiran dalam pertemuan *center* tiap minggunya serta kesesuaian penggunaan pembiayaan sesuai rincian. Pembiayaan tanpa agunan berkisar antara 2 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Tersedia pula pembiayaan mikro bisnis tanpa agunan mulai dari nominal 10 juta sampai dengan 15 juta rupiah apabila usaha anggota mampu berkembang dan menaikkan levelnya menjadi mikro bisnis.

Setiap kali memperoleh pembiayaan, anggota wajib membayar simpanan 3 persen untuk simpanan wajib, 1 persen untuk simpanan pensiun dan dana resiko 1 persen dari jumlah pembiayaan yang diterima. Setiap pertemuan *center* anggota dapat menabung secara sukarela dan diperbolehkan menarik tabungan sukarela kapan saja. Sementara untuk memastikan penggunaan pembiayaan sesuai dengan pengajuan maka petugas lapangan melakukan monitoring ke rumah anggota. Monitoring sekaligus berfungsi membangun kekeluargaan dan memberikan masukan atau motivasi agar usaha bisa berkembang.

Ada tiga jenis pembiayaan yang tersedia yaitu pembiayaan modal usaha, pembiayaan dana talangan pendidikan dan sanitasi. Pencairan dana talangan pendidikan dan sanitasi berbeda dengan pembiayaan modal usaha karena dicairkan langsung kepada pihak sekolah dan tukang yang mengerjakan sanitasi. Sehingga pemanfaatan pembiayaan dana talangan pendidikan dan sanitasi tidak mungkin untuk disalahgunakan.



Tabel 5 Jenis Transaksi Keuangan pada Pertemuan Center seperti di Gambar 4

| Jenis Transaksi Keuangan                  | Keterangan   |
|---|--|
| <b>Pengajuan dan pencairan pembiayaan</b> | Dilakukan sekali setahun atau per 6 bulan  |
| <b>Setor dan penarikan simpanan</b>       | -Simpanan sukarela kapan saja saat pertemuan center<br>-Simpanan paket hari raya diambil menjelang hari raya |
| <b>Pengembalian pembiayaan</b>            | Dilakukan setiap pertemuan center dalam bentuk angsuran mingguan   |
| <b>Tanggung renteng</b>                   | Dilakukan ketika terdapat salah satu atau lebih anggota tidak membayar angsuran mingguan                     |

Sumber: Hasil Wawancara, Diolah Peneliti

Selain pembiayaan, terdapat layanan jasa simpanan yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masa depan anggota. Ada lima jenis simpanan yang tersedia yaitu simpanan wajib, simpanan sukarela, dana resiko, simpanan pensiun dan simpanan paket hari raya. Simpanan wajib disetorkan setiap minggu sebesar 2 ribu rupiah dan hanya bisa diambil ketika keluar dari keanggotaan. Simpanan sukarela disetor kapan saja dan nominalnya sesuai kemampuan. Dana resiko dibayarkan sebesar 1 persen dari jumlah pinjaman yang nantinya

berfungsi sebagai asuransi apabila anggota atau suami anggota meninggal. Jika anggota meninggal, pinjaman anggota tersebut diputihkan atau dianggap lunas dan mendapat santunan sebesar 350 ribu rupiah. Sementara apabila suami anggota yang meninggal maka setengah dari pinjaman anggota tersebut diputihkan.

Selanjutnya simpanan pensiun sebesar 4 persen dari jumlah pinjaman dan bisa diambil ketika keluar dari keanggotaan. Simpanan paket hari raya adalah tabungan yang disediakan untuk memfasilitasi anggota yang ingin menabung untuk keperluan di hari raya.

### E. Pemberdayaan Nonkeuangan

Dalam website resminya KOMIDA juga menyediakan pelayanan nonkeuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, dan pengelolaan keuangan keluarga. Namun, berdasarkan hasil temuan lapangan pelayanan nonkeuangan baru berlangsung pada tataran penyuluhan bukan pelatihan. Materi penyuluhan bertema pendidikan dan kewirausahaan disiapkan oleh tim *community development (comdev)* dan diserahkan kepada masing-masing petugas lapangan untuk dipaparkan kepada anggota di setiap pertemuan *center*. Tim *comdev* mendampingi salah satu petugas lapangan, sementara petugas lapangan lainnya harus melakukan penyuluhan sendiri tanpa pendampingan. Sehingga, kualitas penyuluhan yang diperoleh anggota bergantung kepada kualitas penyerapan informasi dan kemampuan penyampaian informasi oleh petugas lapangan itu sendiri.

Penyuluhan ini tidak maksimal mengingat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pertemuan *center* yang waktunya relatif terbatas. Transaksi keuangan pada pertemuan *center* sudah menyita banyak waktu. Petugas lapangan juga dikejar waktu

untuk menghadiri pertemuan-pertemuan *center* selanjutnya. Sebagai gambaran, seorang petugas lapangan bisa mengunjungi 5 sampai dengan 8 pertemuan *center* sehari. Tentu saja hal ini sangat menguras tenaga dan menghabiskan waktu sehingga wajar apabila petugas lapangan mengutamakan tugas-tugas wajibnya dalam mengurus transaksi keuangan di setiap *center* dibandingkan harus memaksimalkan kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan kesehatan agak berbeda. Tim kesehatan memberi pelatihan selama 6 bulan kepada anggota meliputi pentingnya kesehatan, P3K, kebencanaan dan kesehatan mental. Anggota yang sudah dilatih akan menjadi kader kesehatan KOMIDA dan bertanggung jawab melakukan penyuluhan kepada masyarakat sebanyak 12 sesi dalam sebulan dan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan. Kader-kader kesehatan KOMIDA ini akan mendapatkan apresiasi setiap kali melakukan penyuluhan kepada masyarakat yakni sebesar 33 ribu rupiah per sesinya. Di KOMIDA program ini sudah berjalan sejak tahun 2017, sementara di Cabang Cileungsi program ini baru berjalan pada tahapan perekrutan calon kader kesehatan.

#### **F. Pemanfaatan Pembiayaan Oleh Anggota KOMIDA**

Dari hasil temuan lapangan diketahui bahwa tidak semua pembiayaan dialokasikan untuk keperluan usaha. Ada yang dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, keperluan pendidikan bahkan ada yang membeli sepeda motor yang dianggap penting untuk menunjang kegiatan sekolah anak. Kendati demikian, hampir semua anggota mengutamakan alokasi pembiayaan untuk keperluan usaha bahkan terdapat anggota yang memaksimalkan pembiayaan untuk menambah usaha baru. Sayangnya hal ini belum diadopsi oleh semua anggota. Mayoritas jenis usaha anggota tidak bertambah banyak melainkan hanya

meneruskan usaha yang ada. Bahkan, ada anggota yang tidak bisa menjelaskan sejauh mana perkembangan usaha dan perekonomiannya. Dari sini diketahui bahwa keberhasilan pemberdayaan melalui strategi keuangan inklusif sangat dipengaruhi kemauan dan produktivitas anggota.

Penggunaan pembiayaan di luar keperluan usaha sangat mungkin terjadi mengingat pembiayaan yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan riil usaha mayoritas anggota. Sebagai contoh anggota yang sudah bergabung selama 7 tahun memperoleh pembiayaan sebesar 7 juta rupiah atau lebih. Dana sebesar ini tidak akan habis apabila digunakan untuk modal usaha mikro seperti berjualan nasi uduk, berjualan sembako atau berjualan es dan gorengan. Oleh karenanya tidak aneh apabila pembiayaan ini digunakan untuk keperluan lain di luar keperluan usaha.

Petugas lapangan tidak bisa mengontrol sepenuhnya pemanfaatan pembiayaan yang telah diterima anggota. Di sisi lain anggota juga perlu diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengelola uang yang telah diterima. Pada prinsipnya memberdayakan anggota juga termasuk menanamkan nilai tanggung jawab dalam menggunakan pembiayaan sesuai dengan peruntukannya. Penyuluhan dan masukan kepada anggota pada saat pertemuan *center* maupun pada saat monitoring ke rumah-rumah anggota sudah dilakukan untuk menanamkan nilai tanggung jawab. Pemanfaatan pembiayaan sesuai peruntukannya juga dinilai dan menjadi catatan prestasi anggota.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, setidaknya terdapat 4 jenis anggota berdasarkan pemanfaatan pembiayaan yakni sebagai berikut: *Pertama*, anggota yang memanfaatkan pembiayaan sepenuhnya untuk kepentingan usaha saja. Alasannya karena merasa kebutuhan lain sudah terpenuhi dari keuntungan usaha. Ada juga

yang sadar bahwa pembiayaan sebaiknya memang tidak digunakan untuk kepentingan lain karena sudah jelas tujuannya.

*Kedua*, anggota yang memanfaatkan pembiayaan untuk usaha dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pengakuan petugas lapangan, pembiayaan biasanya 70 persen digunakan untuk usaha dan 30 persennya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari.

*Ketiga*, anggota yang memanfaatkan pembiayaan untuk keperluan usaha dan termotivasi menambah jenis usaha. Terdapat anggota yang memanfaatkan pembiayaan selain untuk menambah isi warung juga merenovasi warung agar terlihat bagus. Ada juga yang sebelumnya hanya berjualan gorengan, namun setelah memperoleh pembiayaan memanfaatkannya untuk membeli mesin jahit demi menambah jenis usaha.

*Keempat*, anggota yang memanfaatkan dana usaha untuk keperluan usahanya dan sisanya disimpan untuk keperluan mendesak di masa depan. Keperluan mendesak ini bisa berkaitan dengan usaha, namun bisa juga untuk keperluan sehari-hari.

## H. Penutup

**Kesimpulan:** Pemberdayaan yang dilakukan oleh KOMIDA Cabang Cileungsi melalui strategi keuangan inklusif ditandai dengan mendekatkan akses pembiayaan tanpa agunan kepada perempuan berpendapatan rendah yang disahkan menjadi anggota. Pembiayaan berguna untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan dan menyejahterakan keluarganya. Pengajuan pembiayaan disertai dengan rincian penggunaan pembiayaan yang dirancang oleh anggota itu sendiri dengan difasilitasi oleh petugas lapangan. Dengan cara ini

anggota semakin berdaya dalam merencanakan masa depan. Petugas lapangan memonitoring pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan rincian penggunaan pembiayaan tersebut.

Pemberdayaan melalui pembiayaan berjalan maksimal mengingat anggota mampu meningkatkan pendapatannya. Sementara, pemberdayaan nonkeuangan masih belum berjalan maksimal mengingat pelaksanaannya baru pada tataran penyuluhan bukan pelatihan. Penyuluhan juga tidak efektif menyampaikan seluruh informasi yang ada karena keterbatasan waktu dan terganggu oleh tugas dan kewenangan utama petugas lapangan. Peran penyuluhan dibebankan kepada petugas lapangan yang beban tugasnya sudah sangat besar dalam mengurus transaksi keuangan di pertemuan *center*, melakukan monitoring dan mengunjungi calon anggota baru.

Terdapat tiga jenis anggota berdasarkan pemanfaatan pembiayaan. Pertama, anggota yang mengutamakan pengalokasian pada keperluan usaha, namun sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kedua, anggota yang memaksimalkan sisa pembiayaan untuk menambah jenis usaha baru. Ketiga, anggota yang memanfaatkan sisa pembiayaan untuk disimpan dan digunakan sebagai dana resiko ketika usaha mengalami kerugian.

**Rekomendasi:** Adapun rekomendasi ditujukan kepada KOMIDA sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan agar memaksimalkan pemberdayaan non keuangan. Caranya adalah memberikan tugas penyuluhan atau pelatihan kepada staf yang khusus mengurus pemberdayaan nonkeuangan dan memberikan waktu khusus bagi pelaksanaannya. Dengan demikian, beban petugas lapangan berkurang dan dapat maksimal menjalankan pemberdayaan melalui keuangan inklusif. Selain itu, perlu ketegasan agar pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara tepat guna untuk

keperluan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui menyesuaikan antara pembiayaan dengan kebutuhan riil usaha anggota.

### I. Ucapan Terima kasih

Terima kasih kepada Pengurus pusat Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) serta pengurus dan anggota KOMIDA Cabang Cileungsi, Bogor, Jawa Barat atas kerja sama selama penelitian ini berlangsung.

### J. Pustaka Acuan

Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*, Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia.

BPS (2019) <https://www.bps.go.id/subject/23/ke-miskinan-dan-ketimpangan.html>

Bullock, Heather E. (2013). *Woman and Poverty : Psychology, Public Policy, and Social Justice*. UK : Wiley Blackwell.

Habibullah. (2019). Inklusi Keuangan dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Socio Informa*. Vol.5 (1). p.38-50.

Koperasi Mitra Dhuafa, (2017). *Annual Report KSP Mitra Dhuafa : Microfinance for Poor Woman*. Jakarta : Komida Pusat.

Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Neuman, W.Laurence. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.

Rahmah, Nur; Jusoff, Kamaruzaman; Heliawaty; Meisanti; Monim, Yosep; Batoa, Hartina; Busaeri, St. Rahbiah, Surni; Ekasari, Kartika; Andi, Kasirang & Nalefo, La. (2013). *The Role of Women in Public Sector and*

*Family Welfare*. *World Applied Science Journal*. Vol.26. Desember 2013. IDOSI Publications.

Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion - A Measure of Financial sector inclusiveness*. Money, Trade, Finance, and Development Competence Center in cooperation with DAAD Partnership and Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin University of Applied Sciences. Working Paper No.07/2012. Berlin.

Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syahrudin, (1986). *Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Kawin di Indonesia dalam Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Kartomo Wirosuhardjo, dkk (Editor). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Website Resmi Pemerintah Kecamatan Cileungsi. (2015). <http://kecamatan-cileungsi.bogorkab.go.id>

Zastrow, Charles (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (Tenth Edition). Belmont USA: Brooks/Cole.

